TUGAS AKHIR

PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK SISTEM PENGELOLAAN ASET BERGERAK SEKOLAH MILIK PEMERINTAH

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Strata Satu pada Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas

Oleh

ANKA STEFANO 06 173 032

Pembimbing

Dr. Ahmad Syafruddin Indrapriyatna Ir. Insannul Kamil, M. Eng, IPM



JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2011

ABSTRAK

Aset merupakan hal yang sangat penting dalam menghitung kekayaan suatu daerah. Seringkali terjadi permasalahan mengenai pengelolaan aset karena pendataan aset yang tidak baik. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesulitan bagi pemerintah dalam menghitung nilai kekayaan daerah. Salah satu aset tersebut adalah aset yang dimiliki sekolah. Pengelolaan aset sekolah yang masih berbasis paperbase dengan memakai buku agenda dapat memicu terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan inventarisir aset. Selain itu, sekolah juga mengalami kesulitan saat menghitung nilai aset yang dimiliki karena status aset yang tidak jelas. Hal ini mengidentifikasikan bahwa pengelolaan aset sekolah di Kota Padang belum efisien dan efektif.

Penelitian ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam menjaring opini para stakeholders aset untuk membangun model usulan pengelolaan aset. Hasil penjaringan opini akan menjadi faktor yang signifikan dalam mengembangkan model terdahulu menjadi sebuah model strategis pengelolaan aset sekolah. Perhitungan nilai buku aset menggunakan metode straight line depreciation untuk membantu stakeholders dalam mengidentifikasi nilai aset yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan kuisioner dalam mengumpulkan data opini stakeholders aset, software Microsoft Access sebagai tool untuk membangun database sekolah dan software Visual Basic 2010 sebagai tool untuk merancang aplikasi untuk pengelolaan aset sekolah.

Dari hasil pengembangan perangkat lunak yang dilakukan, didapatkan hasil inventarisir aset bergerak sekolah yang efektif dan akuntabel. Perangkat lunak yang dihasilkan juga telah berhasil melakukan pengkodean aset bergerak sekolah menggunakan kode batang (barcode).

Key word: Aset bergerak, Analytical Hierarchy Process, Barcode

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah dan latar belakang penelitian yang merupakan tahapan awal penelitian dilakukan.

1.1.1 Latar Belakang Masalah

Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, dan bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Aset meliputi aset keuangan, aset berwujud dan aset tak berwujud. Aset berwujud terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Aset bergerak adalah aset yang dapat berpindah tanpa mengubah fungsi dari aset tersebut.

Akuntabilitas pengelolaan aset negara di Indonesia ternyata masih rendah. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2004, diketahui bahwa dari 158 BUMN ternyata ada 31 BUMN mengalami kerugian sebesar Rp 4,5 triliun. Laba yang diperoleh dari 127 BUMN sebesar Rp 29,6 triliun, sedangkan total aset seluruh BUMN mencapai Rp 1.313 triliun. Dengan demikian, *Return on Asset* (ROA) yang dicapai BUMN hanya 2,49 persen dan *Return on Equity* (ROE) hanya 6,10 persen (Effendi ,2007).

Permasalahan lain mengenai pengelolaan aset yang tidak baik terjadi di provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menemukan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal atas Laporan Keuangan Pemerintah NTT, misalnya ditemukan bukti sertifikat Hak Guna Bangun (HGB) aset tetap tanah senilai Rp 2.316.000.000 yang belum dilakukan peralihan hak; aset tetap

kendaraan senilai Rp 761.732.500 yang telah digunakan oleh pihak yang tidak memiliki hak atas aset tersebut. Selain itu, terdapat nilai kerugian aset tetap senilai Rp 8.605.000.000 sebagai dampak dari kebakaran pada RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang Tahun Angaran 2008 akibat laporan yang tidak akurat sehingga belum dapat diusulkan penghapusan aset (Febriandy, 2010).

Manajemen aset merupakan suatu pendekatan yang dapat memberikan semua informasi dan alat analisis yang diperlukan untuk mengelola aset yang ada menjadi efektif dan dapat memenuhi kebutuhan saat ini dan masa mendatang (Susanto, 2008). Pendekatan ini belum diimplementasikan secara menyeluruh di Indonesia, baik ditingkat korporasi maupun sektor pemerintahan. Pengelolaan aset daerah diatur dalam PP No.6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun, masih adanya permasalahan aset yang timbul menandakan sistem pengelolaan aset yang diatur negara belum terlaksana dengan dan dapat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa manajemen aset belum terlaksana dengan baik sehingga kebutuhan terhadap manajemen aset yang baik menjadi hal yang sangat penting bagi suatu daerah atau suatu instansi.

1.1.2 Latar Belakang Penelitian

Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa di bawah pengawasan guru. Sekolah merupakan salah satu elemen penting dari kemajuan pendidikan suatu daerah. Aset yang dimiliki oleh sebuah sekolah turut meningkatkan akreditasi sekolah yang bersangkutan. Namun, pengelolaan fasilitas tersebut sering kali terabaikan oleh pihak sekolah sehingga dapat menghambat tercapainya tujuan lembaga sekolah. Salah satunya yaitu pendataan fasilitas atau aset bergerak sekolah yang tidak teroganisir dengan baik (Indowarta, 2009).

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah dicapai pada penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

- Pengembangan perangkat lunak yang dihasilkan, mampu menginventarisir aset bergerak sekolah yang efektif dan akuntabel karena perhitungan terhadap nilai aset dapat dilakukan secara realtime.
- Perangkat lunak yang dirancang dapat digunakan oleh stakeholders dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset meliputi pengadaan, pembaharuan status dan penghapusan aset melalui hasil perhitungan nilai aset yang dimiliki.
- Perangkat lunak yang dirancang telah berhasil melakukan standarisasi pengkodean aset bergerak sekolah menggunakan kode batang (barcode) tipe Code 128.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan agar penelitian serupa dapat dikembangkan oleh pihak lain adalah sebagai berikut :

- Mengembangkan model pengelolaan untuk aset fisik seperti bangunan sekolah dan tanah sehingga pengelolaan aset sekolah dapat dilakukan secara menyeluruh.
- Mengembangkan model sistem informasi pengelolaan aset berbasis web.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdellatif, Adel M. Good Governance and Its Relationship to Democracy and Economic Development. *Global Forum III on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity*, Seoul. 2003.
- Akuntansi Indonesia. Manajemen Aset. Edisi No. 13/ Tahun II/ Desember 2008.
- Australian National Audit Office, Aset Management Handbook, 1996.
- Burningham, David. Performance Indicators in Local Government.
- Data Kerusakan Aset Kota Padang Pasca Gempa Tidak Valid. 11 November 2009. Indowarta dari http://indowartas.com
- Definisi Aset Kekayaan Negara Harus Dipertegas. 28 April 2008. Koran Indonesia. Diakses tanggal 24 Juli 2010, dari http://koranindonesia.com
- Djokopranoto, Indrajit. Manajemen Persediaan Barang Dadang, Grasindo. Jakarta. 2003.
- Effendi Arief, M. GCG dan Pengelolaan Aset BUMN. 6 Maret 2007, Suara Karva.
- FASB. Statement of Financial Accounting Concepts No 3 & 5. Stamford, Connecticut. 1980.
- Febriandy, Stevent. **Kerugian Negara di NTT Rp 76 M.** 14 Januari 2010. Timor Express
- Hartati, Ridha Vera. Pendekatan Model Fuzzy Goal Programming dalam Penetapan Pembobotan Prioritas dari Metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Tugas Akhir Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Sumatera Utara, Medan. 2009.
- Hidayat, Agus. Memilih Vendor Pengembang Sistem Informasi Manajemen Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi di UII, Jogjakarta. Vol 1, No 1, pp 33-52. 2004.